



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PACITANTAN
JL. JA. SUPRAPTO NO.8 PACITAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan karunia-Nya maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan telah menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah pada tahun anggaran 2025 yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaiand alam evaluasi akuntabilitas kinerja.

Diharapkan dokumen Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2025 sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam rangka mewujudkan Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitandapat memberikan manfaat bagi pelaksana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan bersih.

Pacitan, - 7 - 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670716 199202 1 002

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	12
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	34
BAB III	36
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH	36
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat Daerah	36
3.3 Program dan Kegiatan	39
BAB IV	42
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
BAB V	59
PENUTUP	59

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan yakni **“MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA dan BAHAGIA”** untuk mencapai Misi Keempat yaitu **Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani**, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai bagian integral perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan menyelaraskan Rencana Strategis dengan visi dan misi tersebut sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dilakukan untuk mengakomodir Perubahan Kedua Renstra Sekretariat yang telah dilakukan, perubahan Renstra dilakukan untuk penyesuaian indikator dan satuan indikator karena regulasi terbaru dari pusat maupun penyesuaian target yang telah tercapai.

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok sesuai dengan fungsi yang diemban oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, maka disusunlah Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagai suatu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disamping sebagai wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 secara proporsional dan terukur, dengan menentukan jenjang tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, hasil dan evaluasi hasil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan terdiri dari :

- a. SEKRETARIS DAERAH
- b. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 - 1) Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
 - 2) Bagian Hukum
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat
- c. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 - 1) Bagian Perekonomian
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan
 - 3) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
- d. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
 - 1) Bagian Umum
 - 2) Bagian Organisasi
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- e. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 ini berdasarkan peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010); dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2016 - 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ini bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rancangan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2025

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan capaian renstra Sekretariat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Sekretariat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah dan perkiraan pelaksanaan DPA Sekretariat Daerah tahun berjalan yang baru disahkan.

Telaah hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi indicator sasaran yang memenuhi, kurang maupun melebihi target yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi kurang maupun melebihi target yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dan kinerja pelayanan, perencanaan dan

penganggaran serta kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pelaksanaan proram kegiatan pada tahun 2024 baru bisa diukur sampai dengan semester pertama dengan capaian indikator sebagai berikut : indikator sasaran Score Nilai LPPD tercapai 3.2368 lebih tinggi dari, indicator Score Nilai target yang ditentukan sebesar 2.7500, indikator Score Nilai Indeks Tata Kelola PBJ tercapai 65.67 lebih tinggi dari target yang ditentukan yaitu 55, indikator Score Nilai SAKIP PD tercapai 79.60 lebih tinggi dari target 74 dan indikator Score Nilai IKM PD tercapai 88.31 lebih tinggi dari target 84.

Matriks review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 terhadap indicator Sasaran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Matrik Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran dan Indikator Sasaran															
Uraian	Indikator	Target Renstra PD						Realisasi Renstra PD							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1.1	Score Nilai LPPD	(Sangat Baik) 2.650	(Sangat Baik) 2.7000	(Sangat Baik) 2.7500	3,2500	3,3000	3,3500	2.8600	2.8600	3.2368	3.2368		
		1.2	Score Nilai Indek Tata Kelola PBJ	(Baik) 45	(Baik) 50	(Baik) 55	66	70	75	41.23	50.60	65.67	65.67		
2	Meningkatnya kualitas tata kelola PD	2.1	Score Nilai SAKIP PD	(>B) 70	(>B) 72	(>B) 74	80	81	82	80.30	80.30	79.60	79.60		
		2.2	Score Nilai IKM PD	83	83.5	84	84.5	85	85.5	78.78	83.18	88.31	88.31		

Sedangkan evaluasi realisasi capaian sasaran Tahun 2024 terhadap target akhir Renstra dapat dilihat sebagaimana table berikut

Tabel 2.2
Realisasi capaian indicator sasaran 2024 terhadap target akhir Renstra

Sasaran		Indikator	Target Akhir RPJMD (2026)	Realisasi sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1.1	Score Nilai LPPD	3,3500	3,2368	96,62%
	1.2	Score Nilai Tata Kelola PBJ	75	81,02	108,03%
Rata - rata capaian sasaran Indikator 1					102,32%
2 Meningkatnya kualitas tata kelola PD	2.1	Score Nilai SAKIP PD	82,00	70,35	85,79%
	2.2	Score Nilai IKM PD	85,50	83,59	97,77%
Rata - rata capaian sasaran Indikator 2					91,78%
Rata - rata capaian sasaran Indikator 1 & 2					97,05%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Dalam bagian ini disajikan capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, tentang Standar Pelayanan Minimal maupun terhadap IKK sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan PD sebagai berikut :

Tabel 2.3
Realisasi kinerja Program Kegiatan sampai dengan 2024 terhadap target akhir kinerja Program Kegiatan 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program		Target Akhir RPJMD (2026)	Realisasi sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.1.1	% kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		1.1.2	% kebijakan dibidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		1.1.3	% kebijakan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.2.1	Persentase kebijakan di bidang perekonomian pembangunan dan SDA yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		1.2.2	% kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan PBJ secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		1.2.3	% kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program pembangunan dan evaluasi pelaporan yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.1.1	% kebijakan dibidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		2.1.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	70,35	87,94%
		2.1.3	% tata kelola keuangan yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		2.2.1	% kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		2.2.2	Nilai IKM PD	85,5	83,59	97,77%
		2.2.3	% kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

1. Permasalahan yang dihadapi

Dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada Tahun 2025 di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan tentunya tidak terlepas dari permasalahan, dan hambatan yang sedikit banyak mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Permasalahan tersebut adalah :

- 1) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Sekretariat Daerah yang masih belum optimal. Kapasitas dan kompetensi SDM ada yang masih belum sesuai dengan bidang tugasnya di beberapa Bagian bisa mempengaruhi capaian kerjanya.
- 2) Beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan masih kurang, baik kualitas maupun kuantitasnya seperti komputer dan kendaraan dinas serta sarana pendukung lainnya.
- 3) Alat Teknologi Informasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.
- 4) Penyediaan data dan informasi yang kurang baik sehingga pengukuran kinerja belum didukung data-data yang valid dan ini akan berpengaruh pada kualitas analisis capaian kinerja.

2. Tindak lanjut penyelesaian masalah

Dari permasalahan-permasalahan tersebut perlu mendapatkan upaya pemecahan sehingga tidak mempengaruhi kinerja pada tahun berikutnya. Upaya pemecahan masalah tersebut antara lain :

- 1) Penataan organisasi, personil dan sarana-prasarana terus dilakukan sampai dipandang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Pengisian dan mutasi pejabat dan staf merupakan salah satu upaya pemecahan yang dilakukan, penambahan sarana dan prasarana baik melalui pengadaan maupun rehabilitasi (pemeliharaan)
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM (personil) yang ada diantaranya dengan mutasi pejabat dan staf, mengusulkan dengan formasi jabatan yang dibutuhkan di Sekretariat Daerah juga dengan menyelenggarakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan baik di dalam daerah maupun mengikuti di luar daerah.
- 3) Selalu meningkatkan upaya-upaya koordinasi, konsolidasi dan kerjasama yang harmonis dengan pihak-pihak terkait diantaranya dengan melaksanakan Rapat Kerja baik dengan PD, Kecamatan maupun Instansi Vertikal, Kunjungan Kerja Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ke PD dalam rangka koordinasi dan pembinaan, membangun kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal.
- 4) Pemanfaatan Teknologi Informasi perlu dimaksimalkan sehingga lebih mudah dan cepat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

- 5) Perlu prioritas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- 6) Perlu meningkatkan kualitas ketersediaan data dan informasi capaian kinerja dengan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik dan tercatat secara valid.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Telaah terhadap rancangan akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan Bupati selaku Kepala Daerah terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan Rancangan akhir RKPD.

Review terhadap rancangan akhir RKPD, meliputi identifikasi prioritas program dan kegiatan. Indikator kinerja program/kegiatan. Tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

Berikut adalah Rancangan akhir RKPD Kabupaten Pacitan dengan analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Tabel 2.4
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PACITAN
TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasi onal	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Sekretariat Daerah						34.284.545.414,00								34.929.597.994,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						22.127.561.136,00								22.772.613.716,00	
4	01	SEKRETARIAT DAERAH						22.127.561.136,00								22.772.613.716,00	
1	4	01	01					14.411.764.320,00							A	16.814.816.900,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah Persentase kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	A	A	A	A								100%		

						Persentase kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana	100%	100%	100%	100%						100%			
						Persentase tata kelola keuangan yang terlaksana	100%	100%	100%	100%						100%			
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%						100%			
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dan Koordinasi Bidang Perencanaan PD	100%	100%	100%	100%	135.000.000,00			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	100%	85.000.000,00	
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	13 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	135.000.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	11 Dokumen	85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	1.048.637.975,00			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	100%	1.048.637.975,00	

4	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	1.048.637.975,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	14 Dokumen	1.048.637.975,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Fasilitas dan Koordinasi Bidang Kepegawaian PD	100%	100%	100%	100%	145.000.000,00			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	100%	145.000.000,00	
4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	200 Dokumen	250 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	145.000.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	200 Dokumen	145.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana PD	100%	100%	100%	100%	3.322.097.810,00			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	100%	4.298.097.810,00	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	40 Paket	30 Paket	30 Paket	740.361.505,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	30 Paket	1.666.361.505,00	SEKRETARIAT DAERAH	

4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	50 Paket	30 Paket	30 Paket	447.004.648,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	30 Paket	447.004.648,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7500 Paket	8000 Paket	7500 Paket	150 Paket	588.160.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	150 Paket	588.160.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750 Laporan	1200 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.546.571.657,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	12 Laporan	1.596.571.657,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PD	100%	100%	100%	100%	1.146.584.978,00			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	100%	1.465.849.778,00	
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.146.584.978,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	12 Laporan	1.465.849.778,00	SEKRETARIAT DAERAH	

4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD	100%	100%	100%	100%	1.029.738.439,00			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	100%	1.529.738.439,00	
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	89 Unit	124 Unit	89 Unit	89 Unit	612.256.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	89 Unit	612.256.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit	50 Unit	50 Unit	151.204.733,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	50 Unit	651.204.733,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	4 Unit	6 Unit	6 Unit	266.277.706,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	6 Unit	266.277.706,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Penunjang Operasional KDH dan WKDH	100%	100%	100%	100%	2.033.374.050,00			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	100%	2.033.374.050,00	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	1.433.374.050,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	28 Orang/Bulan	1.433.374.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	500 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	600.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	28 Orang/Bulan	600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	100%	100%	100%	100%	3.351.331.068,00			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	100%	3.432.331.068,00	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.219.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	12 Paket	2.300.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	991.653.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	12 Paket	991.653.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	140.278.068,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	12 Paket	140.278.068,00	SEKRETARIAT DAERAH

4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Presentase Fasilitas dan Koordinasi Bidang Penataan Organisasi	100%	100%	100%	100%	650.000.000,00			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	100%	690.000.000,00	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	50 Dokumen	100 Dokumen	39 Dokumen	39 Dokumen	150.000.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	39 Dokumen	170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	40 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	300.000.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	8 Laporan	310.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	34 Dokumen	1 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	200.000.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	8 Dokumen	210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%	100%	100%	1.550.000.000,00			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	100%	2.086.787.780,00	

4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	240 Laporan	245 Laporan	240 Laporan	240 Laporan	1.075.000.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	240 Laporan	1.550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	240 Laporan	245 Laporan	240 Laporan	240 Laporan	200.000.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	240 Laporan	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	240 Laporan	242 Laporan	240 Laporan	240 Laporan	275.000.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	240 Laporan	336.787.780,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2	4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase dibidang Bina Mental dan Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	5.413.000.000,00							100%	3.050.000.000,00	
							Persentase Kebijakan di Bidang Perundang-undangan, bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%								100%		

						Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%						100%			
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Bidang Administrasi Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	750.000.000,00			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	100%	700.000.000,00	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00		DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	12 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100 Dokumen	4 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	400.000.000,00		DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	22 Dokumen	350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 Dokumen	5 Dokumen	140 Dokumen	17 Dokumen	200.000.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	17 Dokumen	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesra	100%	100%	100%	100%	3.813.000.000,00			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	100%	1.500.000.000,00	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	150 Dokumen	235 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	3.313.000.000,00		PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	150 Dokumen	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	28 Dokumen	216 Dokumen	200 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00		PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	12 Dokumen	60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	80 Dokumen	81 Dokumen	80 Dokumen	80 Dokumen	440.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	80 Dokumen	440.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Hukum	100%	100%	100%	100%	700.000.000,00			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	100%	700.000.000,00	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	70 Dokumen	110 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	310.000.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	7 Dokumen	310.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	1 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	210.000.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	5 Kasus	210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	700 Dokumen	732 Dokumen	777 Dokumen	777 Dokumen	180.000.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	777 Dokumen	180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kerja Sama	100%	100%	100%	100%	150.000.000,00			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	100%	150.000.000,00		
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	31 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	150.000.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	10 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
3	4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase fasilitasi dan kebijakan di bidang Perekonomian dan SDA yang terlaksana Persentase Kebijakan dan fasilitasi bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana Persentase Kebijakan dan fasilitasi bidang pembangunan yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	2.302.796.816,00							100%	2.907.796.816,00	

4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%	100%	387.000.000,00			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	100%	375.000.000,00	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	5 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	125.000.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	25 Dokumen	125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	3 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen			BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	3 Dokumen	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan	100%	100%	100%	100%	600.000.000,00			-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	100%	718.000.000,00	
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	12 Dokumen	275.000.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	12 Dokumen	275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	12 Laporan	175.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	24 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	12 Laporan	267.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pengelolaan Barang dan jasa	100%	100%	100%	100%	800.000.000,00			-	PP7 - Peningkatan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	100%	1.274.000.000,00	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Dokumen	101 Dokumen	110 Dokumen	110 Dokumen	324.355.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	110 Dokumen	409.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	45 Dokumen	45 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	187.605.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	50 Dokumen	324.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

4	01	03	2.03	0003		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	250 Orang	465 Orang	400 Orang	400 Orang	288.040.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	400 Orang	539.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang SDA	100%	100%	100%	100%	515.796.816,00			-	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	100%	540.796.816,00	
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, ehutanan, Kelautan dan perikanan, perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Naker	5 Dokumen	5 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	440.796.816,00		DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	12 Dokumen	440.796.816,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, LH, Kominfo, perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-	12 Dokumen	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Pada review terhadap rancangan akhir RKPD Tahun 2025 Sekretariat Daerah terdapat beberapa kebijakan terkait dengan penghematan penggunaan anggaran belanja di seluruh program dan kegiatan. Penghematan anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk membiayai program prioritas Kabupaten Pacitan yang pada Tahun 2025 mendesak untuk dilaksanakan yaitu program pengentasan kemiskinan. Diharapkan dengan pengalihan anggaran tersebut target angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan dapat menurun.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2025 Sekretariat daerah Kabupaten Pacitan menangani program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun yang langsung ditunjuk kepada PD Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

Usulan masyarakat tersebut meliputi belanja hibah kepada organisasi masyarakat dan bantuan sosial kepada individu yang kesemuanya diakomodir dalam Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.

Tabel 2.5
Daftar Usulan Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025

No	Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	Besaran Usulan	Keterangan
1	MAJELIS ULAMA INDONESIA (MU) KABUPATEN PACITAN [HIBAH] Alamat : Jl. S.Parman krajan Pucangsewu Pacitan	Rp. 25.000.000	
2	IKATAN PERSAUDARAAN HAJI KAB. PACITAN (IPHI) [HIBAH] Alamat : Lingkungan Barehan Kelurahan Ploso Pacitan	Rp. 25.000.000	
3	DPD MUHAMMADIYAH KABUPATEN PACITAN [HIBAH] Alamat : JL. HOS COKROAMINOTO NO.15 PACITAN	Rp. 25.000.000	
4	PC NAHDLATUL ULAMA (NU) KABUPATEN PACITAN [HIBAH] Alamat : JL. S.PARMAN 44 PACITAN	Rp. 25.000.000	
5	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kab.Pacitan [HIBAH] Alamat : Jl Let.Jend.Suprpto gang 1 No 1 Tuban Sidoharjo	Rp. 25.000.000	
6	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PACITAN [HIBAH] Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No.8 Pacitan	Rp. 150.000.000	
7	Panitia Pembangunan Masjid Besar AT-TAQWA Kecamatan Arjosari [HIBAH] Alamat : Km 1 Arjosari Pacitan	Rp. 100.000.000	
8	SMK MA"ARIF SUDIMORO Lingkungan Teknologi RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo, Desa Sudimoro Kec.Sudimoro [HIBAH] Alamat : Lingkungan Teknologi RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo, Desa Sudimoro Kec.Sudimoro Kab. Pacitan	Rp. 199.900.000	
9	Yayasan Teknologi Nahdlatul Ulama Sudimoro Lingkungan Teknologi RT 03 Rw 05 Dusun Tlogorejo, Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro [HIBAH] Alamat : Lingkungan Teknologi RT 03 Rw 05 Dusun Tlogorejo, Desa Sudimoro, Kec.SudimoroKab. Pacitan	Rp. 200.000.000	
10	Pondok Pesantren Darul Huda RT 01 RW 02 DUSUN NGALURAN, Desa Glinggangan, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : RT 01 RW 02 DUSUN NGALURAN, Desa Glinggangan, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan	Rp. 84.000.000	
11	Pondok Pesantren Terpadu Al Hidayah Dusun Gemah, Desa Ketoro Harjo, Kecamatan Tulakan Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : Dusun Gemah, Desa Ketoro Harjo, Kecamatan Tulakan Kab. Pacitan	Rp. 25.000.000	
12	PONDOK PESANTREN TEKNOLOGI NU SUDIMORO Lingkungan Teknologi RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo, Desa Sudimoro Kec.Sudimoro [HIBAH] Alamat : Lingkungan Teknologi RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo, Desa Sudimoro Kec. Sudimoro Kab. Pacitan	Rp. 168.750.000	
13	KELOMPOK YASIN NGUDI ILMU RT.03 RW.06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC. TULAKAN [HIBAH] Alamat : RT.03 RW.06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC. TULAKAN	Rp. 25.000.000	
14	MASJID NURUL IMAN RT.01 RW.07 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC. TULAKAN KAB. PACITAN [HIBAH] Alamat : RT.01 RW.07 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC. TULAKAN KAB. PACITAN	Rp. 25.000.000	

15	MASJID DARUSALLAM RT.02 RW.06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC.TULAKAN [HIBAH] Alamat : RT.02 RW.06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC.TULAKAN	Rp. 25.000.000	
16	MASJID AT-TAUHID RT.03 RW.06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC. TULAKAN [HIBAH] Alamat : RT.03 RW.06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC. TULAKAN	Rp. 25.000.000	
17	MDT Wustho Al-Ma"arif Jl. Raya Sudimoro No. 08, Desa Sudimoro Kec. Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : Jl. Raya Sudimoro No. 08, Desa Sudimoro Kec. Sudimoro Kab. Pacitan	Rp. 82.800.000	
18	MASJID AN NUR RT 01 RW 09 DUSUN PLAPAR 2 DESA JATIGUNUNG DESA JATIGUNUNG KEC.TULAKAN [HIBAH] Alamat : RT 01 RW 09 DUSUN PLAPAR 2 DESA JATIGUNUNG DESA JATIGUNUNG KEC.TULAKAN	Rp. 25.000.000	
19	MADRASAH DINIYAH BHRUL 'ULUM RT 02 RW 06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC.TULAKAN [HIBAH] Alamat : RT 02 RW 06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC.TULAKAN	Rp. 25.000.000	
20	MASJID BABUTTAUBAH RT 10 RW 05 Dusu Purwoasri, Desa Sembowo Kec. Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : RT 10 RW 05 Dusun Purwoasri ,Desa SEmbowo Kec. Sudimoro Kab. Pacitan	Rp. 26.000.000	
21	Masjid Darul Ulum RT 02 RW 9 Dusun Rejomulyo Desa Sudimoro Kec.Sudimoro [HIBAH] Alamat : RT 02 RW 9 Dusun Rejomulyo Desa Sudimoro Kec. Sudimoro	Rp. 20.000.000	
22	MASJID JAMI' SETROKETIPO RT 02 RW 06 DUSUN KRAJAN LOR DESA NANGGUNGAN KEC. PACITAN [HIBAH] Alamat : RT 02 RW 06 DUSUN KRAJAN LOR DESA NANGGUNGAN KEC. PACITAN	Rp. 25.000.000	
23	RA NU SUDIMORO Lingkungan Teknologi RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : Lingkungan Teknologi RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan	Rp. 99.550.000	
24	LEMBAGA PENDIDIKAN MA"ARIF NU KORTAN SUDIMORO RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan	Rp. 112.000.000	
25	MASJID AT TAQWA RT 004 RW 004 DUSUN BENGKAL DESA TANJUNGSARI KEC.PACITAN [HIBAH] Alamat : RT 004 RW 004 DUSUN BENGKAL DESA TANJUNGSARI KEC.PACITAN	Rp. 24.000.000	
26	MASJID HAJAR FATIMAH RT 05 RW 08 DUSUN MEKARSARI DESA SUDIMORO, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : RT 05 RW 08 DUSUN MEKARSARI DESA SUDIMORO, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan	Rp. 25.000.000	
27	MUSHOLA AN NABAWI RT 05 RW 08 DUSUN MEKARSARI DESA SUDIMORO, Kec. Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : RT 05 RW 08 DUSUN MEKARSARI DESA SUDIMORO, Kec. Sudimoro Kab. Pacitan	Rp. 20.000.000	

28	MUSHOLA SABILLAL MUTAQIM RT 03 RW 11 Dusun Sepang Desa Tulakan Kec. Tulakan [HIBAH] Alamat : RT 03 RW 11 Dusun Sepang Desa Tulakan Kec. Tulakan	Rp. 15.000.000	
29	Masjid Nurul Huda RT 001 RW 004 Dusun Krajan Kidul Desa Nanggungun, Kec. Pacitan Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : RT 001 RW 004 Dusun Krajan Kidul Desa Nanggungun, Kec. Pacitan Kab. Pacitan	Rp. 25.000.000	
30	MUSOLA AL FATAH Lingkungan Mbangteklok Dusun Sidorejo Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : Lingkungan Mbangteklok Dusun Sidorejo Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan	Rp. 26.000.000	
31	Masjid AL-MUHAJIRIN [HIBAH] Alamat : RT. 005 RW. 001 Dusun Krajan Desa Widoro, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Kab. Pacitan	Rp. 30.000.000	
32	YAYASAN JANAIZ JANNAH Jl.Basuki Rahmat 39 Pacitan [HIBAH] Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.39 Pacitan	Rp. 30.000.000	
		Rp. 1.763.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah- Daerah RKPD (rancangan awal) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat Daerah

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.

Tujuan yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan adalah **”Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel”**

Sedangkan sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan indikator kinerja :
 - a. Score Nilai LPPD
 - b. Score Nilai Indek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

2. Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah Dengan indikator kinerja :
 - a. Score Nilai SAKIP Perangkat Daerah
 - b. Score Nilai IKM Perangkat Daerah

Matriks tujuan dan sasaran serta indikator maupun target yang Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Matriks Tujuan dan Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

TUJUAN										SASARAN										
TUJUAN	INDIKATOR	Target							URAIAN	INDIKATOR	TARGET									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021			2022	2023	2024	2025	2026					
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	1	Score Nilai SAKIP Daerah	72	75	77	79	82	84	1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1.1.1	Score Nilai LPPD	(Sangat Baik) 2.650	(Sangat Baik) 2.7000	(Sangat Baik) 2.7500	3,2500	3,3000	3,3500	
		2	Score Nilai IKM Daerah	83	83.5	84	84.5	85	85.5			1.1.2	Score Nilai Indeks Tata Kelola PBJ	(Baik) 45	(Baik) 50	(Baik) 55	66	70	75	
											1.2	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	1.2.1	Score Nilai Sakip PD	(>B) 70	(>B) 72	(>B) 74	80	81	82
													1.2.2	Score Nilai IKM PD	83	83.5	84	84.5	85	85.5

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, yang penjabarannya secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah antara 3-5 tahun atau bersifat tahunan saja. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini mengikuti perubahan regulasi yang sangat frontal terkait dengan nomenklatur Program, Kegiatan dan Penambahan Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beberapa program dan kegiatan yang mengalami perubahan pagu indikatif anggaran, hal ini disebabkan karena kebijakan serta pertimbangan agar program dan kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan baik dan agar target yang ditetapkan dapat tercapai.

Tabel 3.2
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan

4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan antar Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Tabel 4.1
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
SEKRETARIAT DAERAH
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA PENDANAAN TAHUN 2025

Kode					Uraian	Pendanaan						
						Tahun N					Tahun N+1	
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
4	01	02	2,01		Administrasi Tata Pemerintahan							
4	01	02	2,01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000	
4	01	02	2,01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 400.000.000				Rp. 400.000.000	Rp. 350.000.000	
4	01	02	2,01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	
4	01	02	2,02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							
4	01	02	2,02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp. 3.313.000.000				Rp. 3.313.000.000	Rp. 1.000.000.000	
4	01	02	2,02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000	
4	01	02	2,02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 440.000.000				Rp. 440.000.000	Rp. 440.000.000	
4	01	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							
4	01	02	2,03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 310.000.000				Rp. 310.000.000	Rp. 310.000.000	

4	01	02	2,03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 210.000.000				Rp. 210.000.000	Rp. 210.000.000
4	01	02	2,03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 164.915.766	Rp. 15.084.234			Rp. 180.000.000	Rp. 180.000.000
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah						
4	01	02	2,04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
4	01	03	2,01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						
4	01	03	2,01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 125.000.000				Rp. 125.000.000	Rp. 125.000.000
4	01	03	2,01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp. 262.000.000				Rp. 262.000.000	Rp. 250.000.000
4	01	03	2,02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						
4	01	03	2,02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp. 275.000.000				Rp. 275.000.000	Rp. 275.000.000
4	01	03	2,02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp. 175.000.000				Rp. 175.000.000	Rp. 175.500.000
4	01	03	2,02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 267.500.000
4	01	03	2,03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						
4	01	03	2,03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 310.052.761	Rp.14.302.239			Rp. 324.355.000	Rp. 409.650.000
4	01	03	2,03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp. 187.605.000				Rp. 187.605.000	Rp. 324.650.000
4	01	03	2,03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 288.040.000				Rp. 288.040.000	Rp. 539.700.000
4	01	03	2,04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						

4	01	03	2,04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp. 406.529.673	Rp. 34.267.143			Rp. 440.796.816	Rp. 440.796.816
4	01	03	2,04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp. 75.000.000				Rp. 75.000.000	Rp. 100.000.000
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
4	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
4	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 135.000.000				Rp. 135.000.000	Rp. 85.000.000
4	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
4	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 12.156.984.278				Rp. 12.156.984.278	Rp. 12.156.984.278
4	01	01	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 1.048.637.975				Rp. 1.048.637.975	Rp. 1.048.637.975
4	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
4	01	01	2,05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 145.000.000				Rp. 145.000.000	Rp. 145.000.000
4	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						
4	01	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 539.301.988	Rp. 201.059.517			Rp. 740.361.505	Rp. 1.666.361.505
4	01	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 227.134.516	Rp. 219.870.132			Rp. 447.004.648	Rp. 447.004.648
4	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 588.160.000				Rp. 588.160.000	Rp. 588.160.000
4	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1.546.571.657				Rp. 1.546.571.657	Rp. 1.596.571.657
4	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

4	01	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.146.584.978				Rp. 1.146.584.978	Rp. 1.465.849.778
4	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
4	01	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 612.256.000				Rp. 612.256.000	Rp. 612.256.000
4	01	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 151.204.733				Rp. 151.204.733	Rp. 651.204.733
4	01	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 266.277.706				Rp. 266.277.706	Rp. 266.277.706
4	01	01	2,11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
4	01	01	2,11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 1.433.374.050				Rp. 1.433.374.050	Rp. 1.433.374.050
4	01	01	2,11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 600.000.000				Rp. 600.000.000	Rp. 600.000.000
4	01	01	2,12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						
4	01	01	2,12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp. 2.219.400.000				Rp. 2.219.400.000	Rp. 2.300.400.000
4	01	01	2,12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp. 991.653.000				Rp. 991.653.000	Rp. 991.653.000
4	01	01	2,12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp. 140.278.068				Rp. 140.278.068	Rp. 140.278.068
4	01	01	2,13		Penataan Organisasi						
4	01	01	2,13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 170.000.000

4	01	01	2,13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 274.234.458	Rp. 25.765.542			Rp. 300.000.000	Rp. 310.000.000
4	01	01	2,13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 210.000.000
4	01	01	2,14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						
4	01	01	2,14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Rp. 1.075.000.000				Rp. 1.075.000.000	Rp. 1.550.000.000
4	01	01	2,14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
4	01	01	2,14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp. 275.000.000				Rp. 275.000.000	Rp. 336.787.780
Jumlah						Rp. 33.774.196.607	Rp. 510.348.807			Rp. 34.284.545.414	Rp. 34.929.597.994

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan antar Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.